

Original Article

Global Sumud Flotilla: Wacana Tandingan atas Kebenaran Sejarah Israel-Palestina

Nestiti Laras Gemi

Universitas Brawijaya

larasgeminestiti@gmail.com

Abstract:

Tulisan ini membahas Global Sumud Flotilla sebagai bentuk perlawanan epistemik terhadap rezim kolonial Israel di Gaza. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Foucauldian, penelitian ini menelaah bagaimana relasi power/knowledge, regime of truth, serta operasi sovereign, disciplinary, dan biopolitical power membentuk narasi kebenaran mengenai konflik Israel–Palestina. Melalui studi pustaka terhadap dokumentasi Global Sumud Flotilla, arsip sejarah seperti Balfour Declaration dan UN Partition Plan, serta literatur kolonialisme modern, penelitian ini menemukan bahwa produksi diskursus yang dilembagakan dalam hukum internasional, media global, dan perangkat keamanan Israel telah mereduksi kebenaran historis mengenai Palestina. Blokade Gaza sejak 2007 menggambarkan praktik biopolitik yang mengatur ruang hidup, mobilitas, dan akses sumber daya warga Palestina secara sistematis. Kehadiran Global Sumud Flotilla pada tahun 2025 berfungsi sebagai counter-discourse yang menggugat legitimasi moral-politik Israel, sekaligus menyingkap paradoks antara klaim keamanan dan tindakan kekerasan struktural. Penangkapan kapal bantuan di perairan internasional menunjukkan bagaimana rezim kebenaran bekerja menutupi praktik ilegal melalui konstruksi narasi kedaulatan. Penelitian ini menegaskan bahwa kolonialisme Israel bertumpu pada kontrol atas produksi kebenaran, sedangkan Flotilla menawarkan pembacaan alternatif untuk memulihkan kembali memori historis tentang perjuangan Palestina.

Kata Kunci: Sumud Flotilla, Kolonialisme Israel, Analisis Wacana Foucauldian

Pendahuluan

Global Sumud Flotilla salah satu dari rentetan peristiwa kemanusiaan yang secara signifikan menentang paradoks kebenaran sejarah yang selama ini dibingkai oleh narasi kedaulatan dan keamanan Israel. Sumud, secara terminologis memiliki arti keteguhan dan kegigihan dalam bahasa Arab, di mana dimaknai sebagai simbol resistensi masyarakat Palestina terhadap kolonialisme Israel (The Global Sumud Flotilla to Gaza: Everything

You Need to Know, 2025). Selama beberapa dekade, term ini kemudian berkembang menjadi kerangka sosio-politis yang menjadi dasar pergerakan yang melampaui batas teritorial Palestina untuk menegosiasikan kembali identitas bangsa Palestina yang dirampas untuk kepentingan hegemoni kekuasaan dan menentang rezim pembenaran sejarah yang dikonstruksikan oleh otoritas Israel (Teeffelen & Giacaman, 2025). Pada konteks ini kemudian mengonfigurasi keberadaan Global Sumud Flotilla menjadi counter discourse yang selama ini mengonstruksikan memori kolektif melalui regime of truth Israel.

Dalam lanskap geopolitik kontemporer, Gaza menjadi locus yang memperlihatkan cara kerja kekuasaan modern dalam bentuk paling telanjang: perpaduan antara sovereign power, disciplinary power, dan biopower yang menjadikan populasi sebagai objek negosiasi politik, keamanan, dan kalkulasi demografis. Blokade yang diberlakukan sejak 2007 adalah bentuk material dari rasionalitas biopolitik, di mana Israel mengatur mobilitas penduduk, mengontrol energi, pangan, dan medis, serta mengonstruksi Gaza sebagai kolonialisme di era kontemporer

Di tengah konfigurasi kekuasaan tersebut, tepat pada 10 September 2025, lebih dari 50 kapal yang tergabung dalam Armada Global Sumud Flotilla berangkat dari pelabuhan Tunisia menuju Gaza ([Duggal, 2025; Fuente, 2023](#)). Misi ini membawa bantuan logistik dari 47 negara, termasuk kebutuhan pangan, medis, dan pakaian ([Hale, 2025](#)). Dalam rombongan tersebut turut hadir dokter, aktivis hak asasi manusia, jurnalis, hingga anggota parlemen dari berbagai negara Eropa, Afrika Selatan, dan Asia, termasuk di dalamnya komunitas Sumud Nusantara. Keberangkatan ini menandai eskalasi solidaritas global yang paling masif sejak tragedi Mavi Marmara pada 2010, ketika IDF menembak mati sedikitnya sepuluh relawan. Sejak insiden tersebut, koalisi Freedom Flotilla mengorganisir misi-misi yang lebih kecil (The Global Sumud Flotilla to Gaza: Everything You Need to Know, 2025). Tepat di tahun 2025, secara massif mobilisasi global mampu kembali mencapai skala besar yang mengguncang lanskap geopolitik kawasan. Keberangkatan dari Tunisia memiliki signifikansi strategis. Terletak pada pertemuan geografis antara Laut Mediterania dan jalur menuju jazirah Arab, rute ini memberikan ruang navigasi yang relatif lebih aman dari titik-titik militerisasi Israel yang biasa digunakan untuk mencegat kapal bantuan. Selama 16 hari pelayaran, armada menghadapi cuaca buruk dan gangguan teknis, membuat beberapa kapal harus kembali ke dermaga. Namun sebagian lainnya tetap melanjutkan perjalanan, menjaga komunikasi secara real-time melalui situs resmi Global Sumud Flotilla.

Namun pada 27 September 2025, situasi berubah drastis. Tentara IDF mencegat armada di sekitar 60 mil dari pantai Gaza, yaitu wilayah yang secara hukum merupakan perairan internasional. Berdasarkan laporan yang dikonfirmasi oleh sejumlah relawan, operasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan, disertai penahanan paksa, interogasi intensif, dan perlakuan tidak manusiawi. Proses pemulangan para relawan kalut, sebab sebagian relawan terpaksa mengirim sinyal darurat “SOS” untuk menarik perhatian komunitas internasional atas situasi yang memburuk ([Global Sumud Flotilla, 2025](#)). Tindakan ini secara jelas melanggar prinsip freedom of navigation yang tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), serta prinsip-prinsip dasar hukum kemanusiaan internasional mengenai akses bantuan di wilayah konflik. Penangkapan berlanjut hingga 3 Oktober 2025. Total 42 kapal dan 462 relawan dilaporkan diculik dari perairan internasional ([Cordall, 2025; Duggal, 2025](#)). Sekurangnya 9 kapal hilang kontak sejak 8 Oktober, tanpa ada informasi terbaru dari otoritas internasional maupun Israel mengenai keberadaan mereka. Hingga kini,

komunikasi hanya dapat dipantau melalui CCTV di beberapa kapal yang tersisa—sebuah kondisi yang menegaskan krisis akut dalam prinsip transparansi, akuntabilitas negara, dan perlindungan sipil. Situasi ini memperlebar “ruang abu-abu” legalitas yang memungkinkan negara menggunakan kekerasan di luar batas hukum formal sambil tetap mengklaim legitimasi melalui narasi keamanan.

Methods

Tulisan ini menggunakan desk study berbasis analisis wacana foucaultian, di mana konsep-konsep kunci Michel Foucault, terutama power/knowledge, regime of truth, serta operasi sovereign, disciplinary, biopolitical power yang membingkai analisis kerja bagaimana kebenaran historis tentang Israel–Palestina diproduksi, disebarkan, dan dilegitimasi melalui wacana, hukum legal, dan narasi-narasi teologis ([Bigoni & Maran, 2024](#)). Posisi Global Sumud Flotilla sebagai peristiwa kemanusiaan yang, analisis lanjut bahwa kolonialisasi Israel-Palestina telah mendekonstruksikan kebenaran sejarah, Metode ini menggunakan analisis dengan dokumentasi Global Sumud Flotilla, Balfour Declaration dan UN Partition Plan yang terdokumentasikan oleh arsip United Nations, serta buku-buku yang menyiratkan konteks kolonialisme yang terjadi, seperti *10 Myths about Israel* dan *The Complete Diaries of Theodor Herzl*. Dengan demikian, metode ini bertujuan untuk membongkar kebenaran sejarah yang dibungkam untuk menginternalisasi memori kolektif sebagai pertahanan rezim kekuasaan Israel.

Hasil

Jejak Sosio-Historis Israel-Palestina

Sejak awal, penjajakan sosio-historis konflik Israel–Palestina tidak pernah berdiri sebagai rangkaian peristiwa yang netral, tetapi sebagai konstruksi historis yang dibentuk oleh relasi kuasa yang mengonstruksikan *regime of truth*. Identitas yang dikodifikasi melalui bahasa, institusi, dan hukum internasional. Akar dari pertarungan ini dapat dilihat melalui kitab teologis Yahudi mengenai “tanah yang dijanjikan” di wilayah Palestina. Namun demikian, sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, konsep tersebut berubah dari keyakinan religius menjadi legitimasi politik. Perubahan ini dipertajam melalui publikasi *The Jewish State* karya Theodor Herzl, dalam pernyataannya bahwa pemulangan bangsa Yahudi ke tanah leluhur sebagai resolusi politis atas pengalaman diaspora dan antisemitisme ([Herzl, 1960](#)). Akar genealogi historis ini semakin mendapatkan fondasi legalistik melalui *Balfour Declaration* dan *UN Partition Plan*, yang memberikan legitimasi internasional atas klaim teritorial Yahudi terhadap 55% wilayah Palestina ([Balfour Declaration, 1917](#); [Resolution 181, 1947](#)). Alih-alih sekadar pengakuan diplomatik, dua momentum ini membentuk sebuah rezim kebenaran baru, yaitu sebuah narasi historis-politis yang menempatkan Israel sebagai subjek sah atas tanah tersebut, sekaligus mendisintegrasikan eksistensi Palestina sebagai entitas politik yang berhak atas teritorialnya. Dalam bingkai Foucauldian, ini merupakan produksi diskursif, di mana suatu proses lembaga internasional menciptakan, melestarikan, dan mendistribusikan kebenaran mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut.

Sejalan dengan Paul Ricoeur, kekuasaan beroperasi melalui bahasa; dan bahasa yang dilembagakan menjadi wacana dominan berfungsi sebagai perangkat yang menstrukturkan memori ([Jones, 2010](#); [Ricoeur, 1984](#)). Dalam konteks Palestina, narasi kolonial Israel menemukan kekuatannya melalui reinterpretasi teks-teks suci, konstruksi identitas, serta rekontekstualisasi trauma kolektif umat Yahudi, terutama Holocaust. Trauma yang seharusnya menjadi memori tragedi kemanusiaan diubah menjadi argumen moral-politik yang mengukuhkan legitimasi kolonial modern. Memori kolektif *Holocaust* menjadi dasar moral atas tindakan kolonialisme kontemporer terhadap Palestina, menjadikannya tampak sebagai bentuk pertarungan

atas hak teritorial, bukan dari kolonialisasi ([Eid, 2021; Seidel, 2017](#)). Akibatnya, relasi kuasa yang terbentuk menciptakan Palestina direduksi menjadi *stateless*, tersubordinasi, dan termarginalisasi di tanahnya sendiri. Israel memproduksi ambivalensi sejarah melalui narasi bahwa mereka adalah bangsa yang kembali dari keterasingan, sementara Palestina didorong ke posisi bangsa yang asing di tanah yang mereka tinggali selama berabad-abad.

Fenomena ini membentuk sebuah paradoks sejarah: kemerdekaan Israel terwujud melalui ketiadaan negara Palestina. *The statelessness of Palestine*, di mana pengalaman kolonisasi Yahudi menjustifikasi kolonisasi terhadap bangsa lain. Pembungkaman memori kolektif internasional, yang dibentuk oleh media global dan lembaga hukum internasional, selama puluhan tahun mengaburkan struktur kolonial ini. Pada konteks ini merupakan bagian dari proses di mana identitas sosial dan klaim politik dibangun melalui narasi-narasi yang mengaburkan fakta-fakta yang mengancam stabilitas wacana dominan. Pada titik ini, genealogi Foucauldian mendoktruksikan bagaimana reduksi makna atas “tanah yang dijanjikan” menjadi legitimasi kolonial yang mengopresi kekuasaan.

Logika kolonial ini mendorong lahirnya kondisi *necropolitical*, di mana Israel mengatur hidup dan mati populasi Palestina melalui blokade, militerisasi, dan rezim ([Foucault, 1980; Mbembe, 2003](#)). Genosida, kontrol terhadap pangan, listrik, air, dan akses medis sebagai strategi biopolitik yang mengelola populasi dengan cara “membiarkan hidup dan membiarkan mati”. Ini menunjukkan bahwa kolonialisme modern mengonfigurasi populasi bergantung sekaligus dapat dipunahkan kapan saja. Di tengah struktur kuasa seperti inilah ambivalensi kebenaran sejarah bekerja. Israel mempertahankan narasi bahwa penjagaan terhadap Gaza adalah kewajiban keamanan, sementara realitas lapangan memperlihatkan rezim yang secara sistematis menghancurkan kapasitas hidup Palestina. Ambivalensi ini memungkinkan Israel untuk memposisikan diri sebagai pihak yang defensif, bukan agresor, dan menampilkan tindakan kolonial sebagai operasi legal dalam kerangka keamanan.

Konteks post-strukturalis Foucault menekankan bahwa, memori selalu berkelindan terhadap pembentukan ruang kekuasaan simbolis, karena dapat disusun, dipertahankan, direkonstruksi atau diproduksi ulang ([Foucault, 1980; Haryatmoko, 2016a](#)). Melalui jaringan institusional yang luas, Israel mampu mengubah narasi Palestina dari bangsa yang memiliki tanah, menjadi bangsa *stateless*. Posisi kegagalan politik Palestina juga menggambarkan konsekuensi terjadinya situasi ini. seolah-olah kegagalan politik kontemporer adalah akibat dari ketidakmampuan mereka bernegosiasi.

Lebih jauh, proyek kolonial Israel bekerja melalui dua dimensi: *biopower* dan *geopower*. *Biopower* mengatur kehidupan sehari-hari penduduk Palestina melalui kontrol terhadap pangan, air, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan *Geopower* mengatur ruang, perbatasan, akses, dan mobilitas. *Biopower* dan *geopower* ini bekerja bersamaan, menciptakan kondisi di mana populasi Palestina berada dalam ketidakpastian permanen, yaitu sebuah ketidakpastian sebagai strategi yang terstruktur ([Foucault, 1980](#)). Dengan kata lain, kolonialisme kontemporer beroperasi dengan legitimasi moral. Narasi historis yang tidak seimbang ini memunculkan ambivalensi sejarah. Israel yang sejak awal menggunakan memori kolektif untuk kepentingan dan legitimasi moral, sehingga ketidakberimbangan ini semakin mempertahankan kolonialisme hingga saat ini.

Ketika Palestina direduksi menjadi masalah kemanusiaan, kolonialisme Israel mendapatkan bentuk pembenaran baru: seolah-olah konflik ini adalah isu kemanusiaan yang memerlukan bantuan, mediasi, dan pengawasan. Israel membingkai operasi militer besar-besaran, sementara laporan-laporan lembaga internasional memperlihatkan tingginya tingkat kematian warga sipil Palestina, penghancuran infrastruktur dasar, dan pemiskinan sistematis terhadap penduduk. Namun, narasi global tetap terbelah: sebagian pihak menyebutnya genosida, sebagian lainnya menyebutnya operasi kontraterorisme. Ambivalensi ini semakin menegaskan

bagaimana Israel mempertahankan kolonialisasi terhadap Palestina.

Global Sumud Flotilla Mematahkan Ambivalensi Sejarah

Sebelumnya, telah dijelaskan bagaimana ruang kerja kolonialisme Israel untuk mempertahankan genosida dan kejahatan kemanusiaan ekstrem ke pada Palestina atas klaim sejarah yang dimilikinya. Rangkaian selanjutnya menjelaskan bagaimana Global Sumud Flotilla sebagai *counter-discourse* atas operasi *regime of truth*, sebuah konstruksi historis yang menentukan apa yang dapat dikatakan, siapa yang berhak mengatakan, dan kondisi apa yang memungkinkan pernyataan tertentu yang di terima sebagai kebenaran. Foucault menegaskan bahwa kebenaran tidak pernah berada di luar kekuasaan. Ia diproduksi dalam jaringan institusi, prosedur, mekanisme legitimasi, dan praktik diskursif. Dalam konteks Israel–Palestina, “kebenaran” tentang Gaza dibentuk melalui hubungan erat antara militer, birokrasi keamanan, lembaga internasional, ahli strategi, media arus utama, dan aparat hukum yang bekerja sebagai *apparatus* (Foucault, 1980; Haryatmoko, 2016b). Melalui hubungan inilah Israel menegaskan posisi epistemologisnya sebagai satu-satunya otoritas yang berhak mendefinisikan ancaman, menetapkan siapa yang berbahaya, dan merumuskan kondisi normalitas.

Regime of truth Israel bekerja melalui tiga pokok penting, yaitu Pertama, struktur formal seperti Kementerian Pertahanan, Dewan Keamanan Nasional, dan lembaga intelijen yang mendefinisikan ancaman dan menentukan tindakan apa yang valid secara hukum. Kedua, yaitu penggunaan ahli keamanan, akademisi, pusat riset strategi, dan lembaga think-tank yang memberikan aura objektivitas atas tindakan represif. Ketiga, mekanisme citra publik yang menampilkan Israel sebagai negara modern yang rasional, sementara Gaza direduksi menjadi ruang *chaos*, fanatisme, dan ketidakteraturan. Ketiga lapisan ini bekerja simultan, menciptakan konsensus global yang tidak muncul melalui fakta, tetapi melalui validasi berulang terhadap narasi keamanan yang dikendalikan oleh negara kolonial. Dalam logika genealogis, konflik ini bukan pertarungan antara negara dan aktivis, tetapi antara rezim kebenaran dan praktik yang menolak tunduk pada validasi rezim tersebut. Israel bekerja melalui formasi wacana yang mengikat keamanan dengan kedaulatan, kolonialisme dengan regulasi populasi, dan penindasan dengan rasionalitas administratif. Flotilla mengurai formasi tersebut dengan cara yang paling mengancam: ia hadir sebagai tubuh yang menolak untuk direduksi menjadi objek kebijakan keamanan. Keberadaannya mengungkap bahwa apa yang disebut “keamanan nasional” tidak pernah netral; ia adalah efek dari operasi wacana yang mengizinkan pembatasan hidup suatu populasi sebagai tindakan rasional.

Tentu, situasi ini menjadi ancaman kolonialisasi yang sudah berlangsung sejak lama, karenanya Flotilla mengganggu operasi-operasi *regime of truth* sebagai struktur legitimasi simbolik. Israel mampu bertahan bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi karena ia mengendalikan *apa yang dapat diketahui* tentang Gaza. Flotilla mendekonstruksikan atas penundukan atas produksi sejarah yang terus dikonstruksikan melalui media maupun hukum legal yang diakui secara Internasional. Dengan kata lain, dari perspektif Foucault, menantang kondisi pembentukan kebenaran dengan berlayarnya 500 lebih armada kapal menuju pantai Gaza. Dalam titik ini, flotilla memperlihatkan bahwa resistensi atas biopolitik otoritas Israel sekaligus menabrak normalisasi genosida dan kejahatan kemanusiaan ekstrem yang dilakukan sebagai dalih keamanan ataupun bentuk hukum yang telah disahkan.

Di sinilah Israel menjaga *regime of truth* melalui normalisasi: penderitaan warga Gaza diposisikan sebagai kondisi faktual yang tidak memerlukan penjelasan lebih jauh, seolah-olah ia adalah konsekuensi alamiah dari konflik. Flotilla menghancurkan normalisasi tersebut dengan cara memperlihatkan keberadaan manusia di balik statistik—bahwa populasi bukan angka, melainkan tubuh yang ditahan oleh sistem kekuasaan. Dengan demikian, flotilla bukan sekadar protes; ia adalah operasi epistemik yang mengungkap bahwa pengetahuan tentang Gaza diproduksi untuk menjaga keberlanjutan kolonialisme. Secara genealogis, *regime of*

truth Israel adalah bentuk kolonialisasi yang menggabungkan bentuk-bentuk *sovereign, disciplinary, dan biopolitical power* untuk memproduksi populasi “yang diketahui”. Gaza diperlakukan sebagai objek pengetahuan: dipetakan, dihitung, diklasifikasi, dan diawasi. Dalam logika Foucault, “dapat diketahui” berarti “dapat dikontrol.” Dengan kata lain, flotilla memperlihatkan bahwa menghadapi kolonialisme berbasis *regime of truth* membutuhkan praktik yang tidak hanya memproduksi solidaritas, tetapi memproduksi ketidakstabilan epistemik. Resistensi sejati dalam era biopolitik bukan hanya bertanya “apa yang terjadi,” tetapi “bagaimana sesuatu dapat tampak benar.” Inilah level operasi flotilla: ia meretakkan fondasi epistemologis yang membuat kekuasaan kolonial dapat diterima, dapat dipercaya, dan dapat diulang.

Kesimpulan

Global Sumud Flotilla memperlihatkan bahwa kolonialisme Israel atas Palestina bukanlah sekadar konflik geopolitik, melainkan operasi kekuasaan modern yang memadukan *sovereign power, disciplinary power, dan biopower* untuk mengatur hidup dan mati sebuah populasi. Blokade Gaza bukanlah tindakan pertahanan diri, tetapi teknologi biopolitik yang secara administratif memproduksi kelangkaan, ketergantungan, dan kerentanan sebagai cara mempertahankan dominasi. Israel mempertahankan kolonialismenya bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi melalui produksi *regime of truth*.

Dengan kata lain, Global Sumud Flotilla berfungsi sebagai counter-discourse yang mendekonstruksi narasi keamanan Israel dan menyingkap bahwa “kebenaran” mengenai Gaza adalah hasil dari operasi politik yang dapat dilacak secara historis. Ia membongkar ilusi objektivitas yang digunakan untuk mempertahankan kolonialisme, dan memperlihatkan bahwa monopoli Israel atas produksi kebenaran adalah syarat utama keberlanjutan kekuasaannya. Dalam momen ketika flotilla menembus blokade, struktur kolonial diperlihatkan dalam ketelanjangannya: bahwa kekuasaan yang mengklaim diri sebagai penjaga keamanan bergantung pada kekerasan, ketertutupan informasi, dan manipulasi pengetahuan. Di mana, sejak awal pertarungan makna sejarah yang dimanipulasi oleh gerakan zion yang diklaim sebagai “tanah yang dijanjikan” dalam pemahaman teologis. Namun kenyataannya, justru gerakan ini memunculkan dominasi, kontrol, hingga kejahatan kemanusiaan. Bagaimana wilayah yang makmur dan damai, akrena menjadi tempat yang disucikan oleh tiga agama, seketika berubah menjadi wilayah konflik. Paradoks ini kemudian dibongkar melalui analisis dekonstruktif Foucault

Daftar Pustaka

- Balfour Declaration. (1917). United Nations. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-193242/>
- Bigoni, M., & Maran, L. (2024). Of Power, Knowledge, and Method: The Influence of Michel Foucault in Accounting History. *Accounting History*, 29(3), 344–387. <https://doi.org/10.1177/10323732241243088>
- Cordall, S. S. (2025). Gaza Sumud Flotilla updates: Israel Intercepts Boats, Detains Activists. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2025/9/2/live-geta-thunberg-once-more-on-board-sumud-flotilla-sailing-for-gaza>
- Duggal, H. (2025). Gaza Sumud flotilla: How Israel Breaks International Maritime Law. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/10/1/gaza-sumud-flotilla-how-israel-breaks-international-maritime-law>
- Eid, H. (2021). Futuristic Vision for Palestine. *Human Geography*, 14(3), 379–380. <https://doi.org/10.1177/19427786211032349>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-*

- 1977 (C. Gordon (Ed.)). Pantheon Books.
- Fuente. (2023). The Hermeneutic Temptation and Denkverbot of the Palestine-Israel struggle. Medium. <https://medium.com/@FuentesthePhilosopher/the-hermeneutic-temptation-and-denkverbot-of-the-palestine-israel-struggle-5a13ab384ed8>
- Global Sumud Flotilla. (2025). Freedom Flotilla & Conscience Tracker. <https://globalsumudflotilla.org/tracker/>
- Hale, E. (2025). Israel Intercepts Freedom Flotilla Coalition Vessels en Route to Gaza. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/10/8/israeli-military-intercepts-gaza-freedom-flotilla-vessels-report>
- Haryatmoko. (2016a). Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis. Kanisius.
- Haryatmoko. (2016b). Membongkar Rezim Kepastian (Widianoro (Ed.)). Kanisius.
- Herzl, T. (1960). The Complete Diaries of Theodor Herzl (R. Patai (Ed.)). Thomas Yoseloff.
- Jones, L. (2010). Power and Violence by Paul Ricoeur. *Theory, Culture & Society*, 27(5), 18–36. <https://doi.org/10.1177/0263276410375296>
- Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40. <https://muse.jhu.edu/article/39984>
- Resolution 181. (1947). United Nations. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-185393/>
- Ricoeur, P. (1984). *Time and Narrative*. The University of Chicago Press.
- Seidel, T. (2017). We Refuse To be Enemies: Political Geographies of Violence and Resistance in Palestine. *Journal of Peacebuilding and Development*, 12(3), 25–38. <https://doi.org/10.1080/15423166.2017.1356235>
- Teeffelen, T. van, & Giacaman, F. (2025). The Concept of Sumud, Resistance and Citizenship in Occupied Palestine: Critical Pedagogy and Muslim-Christian Living Together. *Journal Of Holy Land and Palestine Studies*, 42(2), 159–179. <https://doi.org/10.3366/hlps.2025.0361>
- The Global Sumud Flotilla to Gaza: Everything You Need to Know. (2025). Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/1/the-global-sumud-flotilla-to-gaza-everything-you-need-to-know-2>